

## POLITIK INTERVENSI NEGARA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PRAKTIK MAGANG MERDEKA

Arya Kusnanta<sup>1</sup>, Irwansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Koresponden email: [aryakusnanta123@gmail.com](mailto:aryakusnanta123@gmail.com)

Koresponden email: [irwansyah.ma@office.ui.ac.id](mailto:irwansyah.ma@office.ui.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan kepentingan negara melakukan intervensi hubungan industrial melalui program Magang Merdeka pada mahasiswa di Indonesia. Analisis berlandaskan teori Hyman (2008) tentang intervensi negara dalam hubungan industrial yang mengajukan premis adanya tiga kepentingan yang tidak selalu sejalan, yaitu: (1) Akumulasi sebagai upaya mendorong kinerja ekonomi, produktivitas, dan daya saing. (2) Pasifikasi melalui kontrol sosial negara seperti penyediaan lapangan kerja di pabrik maupun represi langsung kepada tenaga kerja; dan (3) Legitimasi untuk meningkatkan kesetaraan dan mendukung partisipasi warga dalam mendapatkan dukungan pemerintahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis informasi para pihak yang terlibat dalam program Magang Merdeka melalui data primer yang didapatkan dari wawancara dengan mitra dan peserta program Magang Merdeka, serta data sekunder dari studi literatur penelitian terdahulu yang membahas aspek filosofis dan teknis dari program Magang Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan program Magang Merdeka mengakomodasi ketiga bentuk intervensi negara pada hubungan industrial. Fungsi akumulasi menunjukkan program ini membantu mitra untuk mendapatkan tenaga kerja yang fleksibel dan dibiayai pemerintah, sehingga dapat menciptakan fleksibilitas kerja. Fungsi pasifikasi menunjukkan upaya pembentukan kepatuhan birokrasi bagi perguruan tinggi. Fungsi legitimasi menunjukkan upaya meraih dukungan program dari *stakeholder* agar program dapat berlanjut.

**Keywords:** *Hubungan Industrial, Pemagangan, Magang Merdeka*

### PENDAHULUAN

Di tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) meluncurkan sebuah program yang bernama Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM dirancang sebagai bentuk transformasi pendidikan di Indonesia – yang mana MBKM mendorong inovasi pendidikan tinggi yang fleksibel dan serbaguna, didesain untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kreatif dan inklusif sesuai kebutuhan mahasiswa dengan memberikan mahasiswa pengalaman belajar yang beragam dan tambahan

kompetensi baik di dalam maupun di luar kampus (Meke et al., 2022). Program utama dalam MBKM mencakup kemudahan dalam pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, serta mempermudah perguruan tinggi negeri untuk bertransformasi menjadi PTN Berbadan Hukum (PTN-BH). Selain itu, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studi serta memiliki kesempatan selama tiga semester untuk belajar di luar perguruan tinggi, termasuk melalui magang, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, dan kegiatan kewirausahaan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Salah satu program turunan dari program MBKM adalah Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) atau program Magang Merdeka. Secara garis besar, program magang dapat dipahami sebagai bentuk pembelajaran berbasis pekerjaan (*work-based learning*) yang ditujukan oleh instansi pemerintahan maupun swasta kepada mahasiswa perguruan tinggi untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja awal guna meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja yang kompetitif dan memberikan kesempatan berpartisipasi untuk menerima pembelajaran langsung tentang karir masa depan tertentu hingga mempersiapkan mereka untuk bekerja penuh waktu setelah lulus (Franette, 2015; Mala et al., 2020; Bawica, 2021). Magang juga disebut dapat berkontribusi untuk negara dalam membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang tangguh, mudah beradaptasi, dan tahan saat krisis sehingga negara di berbagai wilayah mulai mengadopsi pelaksanaan praktik pemagangan (European Centre for the Development of Vocational Training, 2022). Hal ini yang tercermin dalam tujuan utama dibentuknya program Magang Merdeka yaitu bentuk pembelajaran berbasis pekerjaan yang penting bagi mahasiswa perguruan tinggi, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kerja awal guna meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja yang kompetitif serta mempersiapkan mereka untuk karir masa depan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Magang Merdeka kemudian membangun fokus pemerintah agar dapat memainkan peran kunci dalam membantu dunia industri untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkompentensi dengan cara mengembangkan keterampilan mahasiswa guna membangun “jembatan” antara lulusan dan dunia kerja (Siminjuntak et al., 2022). Kemdikbudristek – melalui tim MSIB – memastikan bahwa program ini dapat menjadi persiapan mahasiswa pasca lulus menuju dunia kerja dan sebaliknya dunia industry dan dunia kerja dapat menyerap lulusan perguruan tinggi yang berkompentensi. Program ini menjadi salah satu dari 8 (delapan) program utama yang diminati oleh mahasiswa di Indonesia. Tercatat sebanyak 151.724 orang mahasiswa pendaftar program MSIB dari total 285.968 orang pendaftar program MBKM secara keseluruhan di tahun 2024 atau *batch* 6 bagi program MSIB (Data Tim MSIB, 2024). Ini kemudian menunjukkan bahwa peminat program Magang Merdeka termasuk tinggi karena mencapai 53% dari total keseluruhan pendaftar program MBKM di tahun 2024, yang mana hal itu juga menjadi bagian dari pencapaian tim MSIB (Tim MSIB, wawancara dengan penulis, Mei, 2024).

Namun praktik Magang Merdeka mendapatkan beberapa kritik terkait fokus dan teknis program. Pertama, konsep program Magang Merdeka ini merupakan

suatu bentuk yang “baru” dari pemagangan yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Magang Merdeka berbeda dengan konsep pemagangan yang diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang lebih ditujukan untuk pencari kerja atau pelatihan profesional, sehingga program Magang Merdeka tidak menggunakan landasan terkait program pemagangan tersebut. Akibatnya terdapat “kekosongan hukum” terkait landasan hukum penyelenggaraan pemagangan sehingga berpotensi menyebabkan posisi mahasiswa sebagai peserta magang rentan terhadap eksploitasi dan ketidaksesuaian kerja selama program Magang Merdeka (L. Tobing, 2017 dalam Syah & Taun, 2023; Adinda, 2022). Program Magang Merdeka ini menjadi suatu bentuk praktik pemagangan yang baru dengan Kemdikbudristek yang mengambil alih tanggung jawab untuk segala proses pelaksanaan program pemagangan, seperti halnya pemberian uang saku, pengaturan terhadap kurikulum atau materi pemagangan oleh Kemdikbudristek kepada perusahaan, hingga adanya potensi pemaksaan agar universitas memberikan rekognisi atau konversi Satuan Kredit Semester (SKS) hingga 20 SKS.

Kedua, program ini dianggap terlalu mengarahkan perguruan tinggi menjadi "pabrik" tenaga kerja untuk industri (Hadinata, 2021) karena kerap kali narasi Mendikbudristek Nadiem Makarim sering menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan, sehingga program ini bertujuan menyiapkan mahasiswa agar lebih kompetitif di pasar kerja dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan keterampilan (Kemdikbudristek, 2023). Permata Adinda (2022) mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo berharap kolaborasi perguruan tinggi dengan industri bisa menciptakan mahasiswa yang utuh dengan budi pekerti dan visi kebangsaan yang baik, sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan seperti Magang Merdeka untuk membentuk mahasiswa yang “ideal”. Berdasarkan kedua hal tersebut, menunjukkan adanya sebuah bentuk atau kepentingan negara untuk melakukan intervensi hubungan industrial yang mana menurut Hyman (2008) negara memiliki fungsi yang luas dan seringkali kontradiktif dalam intervensi hubungan industrial karena terlihat adanya upaya Kemdikbudristek untuk mengatur hubungan industrial *bipartite* – antara pekerja dan pemberi kerja.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mengajukan pertanyaan utama yaitu: “Bagaimana bentuk kepentingan negara dalam perannya melakukan intervensi terhadap hubungan industrial melalui program Magang Merdeka?” Tulisan ini menganalisis kepentingan negara dalam intervensi hubungan industrial melalui program Magang Merdeka pada mahasiswa menggunakan teori Hyman (2008) yang menyebutkan negara memiliki fungsi yang luas dan seringkali kontradiktif dalam hubungan industrial. Hyman mengidentifikasi tiga fungsi utama negara: akumulasi, pasifikasi, dan legitimasi. Akumulasi melibatkan dukungan negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan modal melalui kebijakan yang menguntungkan pelaku pasar. Pasifikasi mencakup kontrol sosial melalui penyediaan lapangan kerja atau represi langsung terhadap tenaga kerja. Legitimasi melibatkan intervensi sosial untuk meningkatkan kesetaraan dan partisipasi warga, mempertahankan dukungan populer terhadap pemerintah.

Penulis mengasumsikan bahwa program Magang Merdeka mencerminkan tiga peran negara dalam intervensi hubungan industrial: akumulasi, pasifikasi, dan legitimasi. Pertama, fungsi akumulasi terlihat dari upaya negara memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja tambahan yang fleksibel dan dibiayai pemerintah, mendukung akumulasi keuntungan perusahaan. Kedua, fungsi pasifikasi dijalankan dengan merepresi potensi gerakan mahasiswa dan membentuk mahasiswa "ideal" yang mengikuti program pemerintah. Ketiga, fungsi legitimasi tercermin dalam upaya meraih dukungan dari sektor swasta dan mahasiswa, karena program ini dianggap memberikan solusi win-win: perusahaan mendapatkan tenaga kerja tanpa biaya, sementara mahasiswa mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi di industri.

### TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa praktik Magang Merdeka menciptakan sebuah "perspektif baru" dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, tetapi dikhawatirkan menciptakan potensi *gap* dalam tujuan pendidikan tinggi di Indonesia yang lebih menekankan pada fokus pemenuhan kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja. Hadinata (2021) dalam tulisannya menganalisis bahwa program Kampus Merdeka dan program turunannya terlalu menekankan pada fokus terhadap pendekatan pasar dan kebutuhan industri karena fokus program ini semata hanya dibuat sebagai penyedia tenaga kerja siap pakai dan berpotensi untuk mengabaikan aspek pendidikan secara demokratis yang menyiapkan warga negara yang kritis. Penulis kemudian menjelaskan bahwa MBKM tidak dapat sepenuhnya menjawab tantangan terhadap perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, karena kembali lagi hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan dari dunia industri.

Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Riandy dan Tapiheru (2022) dan Wirayudha (2023) mengungkap bahwa program Magang Merdeka lebih fokus mempersiapkan mahasiswa untuk bersaing di pasar kerja yang kompetitif dengan membawa risiko prekarisasi dan eksploitasi dengan potensi mengorbankan kesejahteraan dan perlindungan mahasiswa, seperti potensi eksploitasi selama magang, pembayaran yang tidak layak, perjanjian kerja yang tidak jelas, dan kondisi kerja yang tidak memadai, hingga berada dalam posisi rentan terhadap bentuk "perbudakan modern" karena mahasiswa sebagai sosok *powerless* yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam hubungan pekerjaan dan memunculkan kesenjangan dalam perlindungan hak-hak mahasiswa pekerja magang.

Permasalahan lain terkait program Magang Merdeka adalah kejelasan terhadap landasan hukum program terkait pelaksanaan praktik pemagangan dan posisi mahasiswa selaku peserta magang. Melalui penelitian Syah & Taun (2023) menyoroti masalah regulasi terkait posisi hukum mahasiswa dalam program Magang Merdeka dan perlindungan hukum mereka sebagai peserta magang dalam konteks ketenagakerjaan. Meskipun panduan program MSIB menetapkan kewajiban bagi mitra industri untuk mematuhi undang-undang ketenagakerjaan, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan regulasi terkait status mahasiswa sebagai peserta magang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara peran magang sebagai pembelajaran dan pelatihan kerja untuk tujuan pekerjaan.

Kekosongan hukum dalam perlindungan mahasiswa magang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program, yang menimbulkan masalah seperti keterlambatan pembayaran uang saku dan pemutusan kerjasama sepihak. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi mahasiswa Magang Merdeka. Melalui tulisan ini dapat memberikan gambaran terkait dengan perbedaan konsep dan *gap* antara Magang Merdeka versi Kemdikbudristek dengan praktik pemagangan milik Kementerian Ketenagakerjaan.

## KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan analisis teori Hyman (2008) yang dalam bukunya "*The State in Industrial Relations*" menyatakan bahwa negara memiliki peran dalam intervensi hubungan industrial dengan kepentingan yang "luas dalam konteks spektrumnya, tetapi seringkali kontradiktif satu dengan yang lainnya" (Hyman, 2008: 261-262). Hyman membagi kepentingan negara dalam intervensi hubungan industrial ke dalam tiga premis utama: akumulasi, pasifikasi, dan legitimasi. Analisis ini didasarkan pada contoh negara-negara Amerika Serikat dan Eropa, sementara penelitian lanjutan oleh Hutchinson (2016) mengkontekstualisasikan ketiga fungsi negara tersebut dalam dinamika hubungan industrial di negara-negara berkembang dan *Newly Industrializing Countries* (NICs) dengan studi kasus di Filipina. Ketiga fungsi negara tersebut menurut Hyman (2008) adalah:

1. Akumulasi, yaitu negara memiliki fungsi dan kepentingan dengan berperan menyediakan tenaga kerja sebagai upaya dalam mendorong kinerja ekonomi, produktivitas, dan daya saing. Namun, Hyman dalam tulisannya menyoroti perdebatan penting tentang apakah diperlukan intervensi aktif dari negara untuk mencapai tujuan tersebut, atau apakah pasar harus "dibebaskan" karena kebijakan non-intervensi atau deregulasi sebenarnya merupakan bentuk intervensi atau regulasi tersendiri. Dengan kata lain, membiarkan pasar berjalan tanpa campur tangan pemerintah juga merupakan kebijakan yang mempengaruhi pasar dan hubungan industrial. Hutchison dalam penelitiannya memberikan contoh di bawah kepemimpinan Presiden Marcos, Filipina mengimplementasikan kebijakan Industrialisasi Berorientasi Ekspor (Export-Oriented Industrialisation / EOI) sebagai bentuk utama intervensi negara terhadap pasar tenaga kerja yang memungkinkan perusahaan multinasional membangun industri di Filipina, sehingga negara dapat menyediakan lapangan kerja yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional (Hutchison, 2016). Praktik ini menunjukkan bahwa kepentingan negara lebih dominan daripada akumulasi kapital oleh perusahaan swasta, meskipun akumulasi kapital tetap menjadi pondasi utama perekonomian negara.
2. Pasifikasi, yaitu fungsi dan kepentingan negara dalam intervensi hubungan industrial melalui kontrol sosial negara dengan metode-metode formal, seperti penyediaan lapangan kerja di pabrik maupun represi langsung (*direct repression*) sebagai bentuk eksploitasi buruh dan meredam potensi gerakan buruh "kiri" yang dianggap mengancam kestabilan pemerintah. Penelitian Hutchison di Filipina menunjukkan bahwa metode ini berhubungan langsung

dengan pembatasan mobilisasi kolektif, terutama kekuatan kiri yang secara periodik mengancam ketertiban. Pasifikasi tercermin dalam bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap pekerja serikat yang dilakukan dengan impunitas oleh aktor negara dan non-negara (Hutchison, 2016). Pasifikasi sering digunakan untuk menjamin stabilitas politik yang mendukung kepentingan akumulasi ekonomi, baik oleh negara maupun pihak swasta.

3. Legitimasi, yaitu fungsi dan kepentingan negara dalam intervensi hubungan industrial untuk menjaga persetujuan publik dengan mengejar kesetaraan sosial dan memfasilitasi partisipasi tenaga kerja dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Berbeda dengan pasifikasi yang merupakan bentuk represi, legitimasi adalah pengakuan atau insentif dari negara untuk mendapatkan dukungan publik. Dalam konteks penelitian Hutchison (2016) di Filipina, pemerintah secara periodik berupaya meredakan tuntutan dan protes buruh dengan langkah-langkah promosi kesetaraan, meski tanpa penegakan hukum yang efektif. Metode ini digunakan untuk mengintervensi pasar tenaga kerja guna membangun dukungan massa, khususnya dari segmen tenaga kerja, terhadap pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak. Metode ini digunakan sebagai instrumen penyeimbang dalam hubungan bipartit antara perusahaan dan pekerja yang seringkali eksploitatif, dengan negara berperan sebagai penengah dalam hubungan tripartit.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Bryman (2012, p. 380) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dicirikan dengan penggunaan teori atau kategorisasi yang didapatkan dari proses pengumpulan dan analisis data yang menghasilkan data bersifat induktif untuk mendeskripsikan suatu peristiwa melalui kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus dan melalui beberapa metode alamiah. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan dalam menginterpretasikan dan memahami bentuk kepentingan negara terkait intervensi pada hubungan industrial melalui pelaksanaan program Magang Merdeka pada mahasiswa di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan melalui pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dengan beberapa informan (identitas dirahasiakan) yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dalam jangka waktu bulan Maret hingga Mei 2024, yaitu tim program MSIB Kemdikbudristek sebagai institusi penyelenggara program Magang Merdeka untuk mendapatkan informasi terkait esensi dan penyelenggaraan teknis program Magang Merdeka, 5 (lima) perusahaan mitra program Magang Merdeka untuk memperoleh informasi mengenai dampak atau *benefit* dari adanya program Magang Merdeka terhadap performa perusahaan, dan 10 (sepuluh) mahasiswa peserta Magang Merdeka untuk memperoleh informasi mengenai kondisi praktik kerja selama pelaksanaan Magang Merdeka. Penulis juga menggunakan data sekunder dari studi literatur berupa sumber bahan bacaan dan/atau penelitian, seperti buku, artikel jurnal, rilis pernyataan resmi Kemdikbudristek, dan dokumen lainnya yang dapat memperkuat data hasil penelitian mengenai esensi secara filosofis maupun teknis

dari program Magang Merdeka yang menunjukkan keterkaitan kepentingan negara terhadap intervensi hubungan industrial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kebijakan Transformasi Pendidikan Tinggi Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dunia Industri**

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan pendidikan transformatif yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek Republik Indonesia pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim. Kebijakan ini mendukung kerangka ekosistem pentahelix, yang mencakup sinergi antara perguruan tinggi dan kebutuhan dunia industri, bisnis, masyarakat, dan pemerintah melalui konsep Work-Integrated Learning (WIL). Tujuannya adalah membangun masyarakat yang kompetitif, cerdas, fleksibel, kreatif, inovatif, terampil, berintegritas, produktif, dan berkarakter sesuai prinsip Pancasila (Rustandi, 2020; Sodik et al., 2021; Afriansyah et al., 2022). Lahirnya kebijakan MBKM terkait dengan proyek pemerintah Indonesia di sektor pendidikan, yakni *Indonesian Managing Higher Education for Relevance and Efficiency* (IMHERE) yang dirancang oleh Bank Dunia melalui *Higher Education Reform – Policy Framework Education* (HER-PFE) (Gani et al., 2022). Ini menjadi dasar terbentuknya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang mendorong transformasi pendidikan tinggi sebagai corporate university dan mempermudah perguruan tinggi menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik dalam maupun luar negeri (Yulianto et al., 2021; Muslim et al., 2021).

Salah satu program turunan dari MBKM adalah Magang Merdeka. Program ini dibuat dengan latar belakang menurut wawancara tim MSIB dan buku panduan program Magang Merdeka bahwa pemerintah menganggap mahasiswa kurang terlibat dalam dunia kerja ketika mengikuti magang yang relatif jangka pendek sehingga kurang efektif dalam memberikan pengalaman dan keterampilan industri bagi mahasiswa. Kemendikbudristek kemudian merancang program Magang Merdeka dengan tujuan mengoreksi program magang jangka pendek tersebut agar kompetensi soft skills dan hard skills mahasiswa lebih meningkat dan meningkatkan keterserapan tenaga kerja pasca lulus di dunia industri dan dunia kerja (Tim MSIB, wawancara dengan penulis, Mei 2024; Tim Microdential, 2021). Menariknya, menurut tim MSIB, program ini juga dibentuk sebagai sarana penyaluran dana Kemdikbudristek kepada mahasiswa – setara dengan beasiswa KIP Kuliah atau Bidikmisi – tetapi dengan penugasan langsung di industri dan dunia kerja. Penyaluran dana pendidikan ini telah menjadi amanat yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa dana pendidikan – di luar gaji dan biaya pendidikan kedinasan -- dialokasikan 20% dari APBN dan APBD. Magang Merdeka menyalurkan dana Bantuan Biaya Hidup (BBH) hingga Rp 2.800.000 per bulan untuk setiap mahasiswa peserta program. Penyaluran dana ini yang kemudian menjadi “daya tarik” bagi mahasiswa agar mau mengikuti program karena jaminan magang yang mendapatkan upah.

Kebijakan MBKM ini perlu dicermati punya dampak pada cara perguruan tinggi beradaptasi dan strategi keberlanjutan mereka, yang mendekatkan

pendidikan tinggi pada praktik komersialisasi. Perguruan tinggi didorong aktif seolah-olah "menjual" mahasiswa ke dunia industri (Susilo, 2021). Akibatnya, kurikulum dapat diubah kapan saja untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan industri, yang memosisikan mahasiswa sebagai investasi di universitas (Abdullah & Osman, 2017; Kodrat, 2021). Ini mencerminkan upaya terhadap neoliberalisasi pendidikan tinggi, di mana negara menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi hubungan industrial. Paradigma bergeser dari transfer pengetahuan ke kompetisi pasar, menganggap pendidikan sebagai komoditas ekonomi yang bisa diperdagangkan (Brewis, 2018; Toyibah, 2018; Gani et al., 2022).

Dalam program Magang Merdeka, negara dikritik beberapa kajian seperti berperan dalam "manufakturisasi kurikulum" yang terlalu fokus menghasilkan sumber daya manusia semata sesuai kebutuhan dunia industri (Susilo, 2021). Program ini menjadikan mahasiswa selayaknya "konsumen" dalam pasar global untuk bebas memilih barang – dalam hal ini kegiatan yang paling relevan dengan kebutuhan dunia industri (Cannella & Ljunberg, 2017). Dampaknya adalah bahwa pendidikan tinggi berubah menjadi sesuatu yang diperdagangkan dengan penekanan yang kuat pada persaingan, pengukuran, penilaian, dan kecenderungan untuk terus memprioritaskan faktor ekonomis sehingga pendidikan untuk lebih mengedepankan keberhasilan individu dalam nilai ekonomis sebagai karakter sukses yang memiliki nilai moral dalam masyarakat (Evans, 2020). Konstruksi sukses yang mengikuti pasar inilah kemudian berpotensi menciptakan kondisi merasa terasing atau alienasi bagi mereka yang minat terhadap hal-hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasar akibat kurangnya kendali atas pilihan mereka (*operational powerlessness*) dan persepsi bahwa kebijakan tidak memiliki nilai sosial yang relevan (*societal powerlessness*) (Tummers, 2017).

### **Negara dan Hubungan Industrial: Bentuk Intervensi Negara Terhadap Hubungan Industrial Melalui Program Magang Merdeka**

Berdasarkan arah program yang dianggap terlalu fokus terhadap neoliberalisasi pendidikan tinggi dan pemenuhan kebutuhan industri, penulis kemudian tertarik untuk menganalisis keterkaitan antara program Magang Merdeka dengan kepentingan negara terhadap intervensi hubungan industrial – sebagaimana yang dituliskan oleh Hyman bahwa terdapat tiga bentuk kepentingan negara yaitu akumulasi, pasifikasi, dan legitimasi. Bagian ini akan menguraikan dinamika dari ketiga bentuk kepentingan ini yang ditemukan dari pengumpulan data empirik pada pelaku-pelaku di Magang Merdeka.

Menurut Hyman, fungsi akumulasi adalah peran negara dalam menyediakan tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja ekonomi, produktivitas, dan daya saing. Jika dikaitkan dengan Magang Merdeka, informan tim MSIB menyebutkan pelaksanaan program Magang Merdeka memperhatikan kepentingan akumulasi terkait pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja karena berangkat dari permasalahan ketenagakerjaan yaitu kondisi bonus demografi dan tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi sebesar 5,32% (data tim MSIB, 2024). Tim MSIB menjelaskan bahwa pihaknya memastikan agar program ini menguntungkan mitra untuk mendapatkan talenta mahasiswa yang siap magang dan menguntungkan mahasiswa sebagai peserta dengan mendapatkan tempat magang di perusahaan ternama nasional hingga



internasional dengan kurikulum pelatihan kerja/*mentoring* yang dilaksanakan oleh mentor dari luar negeri dengan cara memonitoring proses rekrutmen dan seleksi bagi mitra maupun peserta.

Akumulasi bentuk keuntungan ini kemudian diukur melalui *end-point survey* tim riset MSIB yang menyebutkan terdapat beberapa akumulasi keuntungan alumni peserta program Magang Merdeka seperti mendapatkan gaji sebesar 1,78 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 0,22 kali UMP, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah hanya selama 1,1 bulan dibandingkan rata-rata nasional selama 4 bulan, dan rata-rata perusahaan mitra program Magang Merdeka di berbagai jenis industri mendapatkan sebanyak 100 hingga 150 orang pekerja dari peserta program Magang Merdeka. Ini menunjukkan bahwa Kemdikbudristek berupaya untuk mengoreksi keadaan yang mana sebelumnya mahasiswa lulusan perguruan tinggi kurang berkompeten dalam dunia kerja – yang dijelaskan dari adanya perbedaan besaran upah dan waktu tunggu – sehingga Kemdikbudristek mengintervensi dengan memberikan sebuah program yang diklaim dapat meningkatkan kualitas dari mahasiswa yang terlibat dalam program tersebut.

Dari perspektif mitra program Magang Merdeka, program ini dianggap sebagai "simbiosis mutualisme" yang memberikan akumulasi keuntungan antara kebutuhan dunia industri dan pemerintah. Pemerintah menyediakan tenaga kerja tambahan secara "gratis" dan mitra program berperan sebagai "perpanjangan tangan" untuk transfer pengetahuan kepada mahasiswa sesuai kebutuhan industri (PT JI dan PT ED, wawancara dengan penulis, Maret 2024). Magang Merdeka lebih inovatif dibandingkan program magang sebelumnya karena memungkinkan praktik hubungan industrial yang sebelumnya sulit dilakukan karena durasi magang yang pendek, sekarang melalui program Magang Merdeka perusahaan mendapatkan tenaga kerja tambahan selama 5 bulan dan mengatasi kurang efektifnya magang jangka pendek bagi mahasiswa dan industri (Tim Microdential, 2021). Namun program yang menawarkan konsep "merdeka" dan perbedaan peraturan ini berimplikasi terhadap fleksibilitas praktik kerja yang tidak lagi memandang relevansi jurusan peserta magang sehingga memungkinkan mahasiswa memilih pekerjaan yang diinginkan tanpa melihat kesesuaian program studi dan perusahaan dapat dengan bebas memberikan beban pekerjaan kepada peserta (Pekerja PT P dan PT I, wawancara dengan penulis, April 2024).

Selain itu, program Magang Merdeka juga meringankan beban biaya operasional perusahaan karena mendapatkan tenaga kerja tambahan dibiayai oleh pemerintah yang membantu operasional mereka dibandingkan harus merekrut peserta magang non-Magang Merdeka yang menambah beban biaya uang saku dan operasional perusahaan, terutama di masa pendapatan menurun seperti yang dialami perusahaan media (informasi penurunan pendapatan bersifat rahasia). Hal ini juga menjadi kesempatan bagi perusahaan dapat melakukan efisiensi jumlah karyawan karena peserta magang dapat menggantikan peran karyawan tetap atau kontrak tanpa biaya tambahan, yang pada akhirnya menekan posisi karyawan tetap dan berpotensi menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi efisiensi (Pekerja PT A, perusahaan media, wawancara, April 2024). Hal ini yang kemudian menjadi sebuah potensi untuk perusahaan secara lebih lanjut melakukan tindakan

PHK secara sewenang-wenang karena menganggap peserta Magang Merdeka cukup dalam

Dari perspektif mahasiswa sebagai peserta program Magang Merdeka ditemukan bahwa informan penelitian ini menyadari kepentingan akumulasi negara dalam intervensi hubungan industrial. Dalam fungsi akumulasi, program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja, memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, dan mengatasi persoalan keterserapan lulusan perguruan tinggi pasca lulus (A.F., H.E., dan R.A., wawancara, Maret 2024). Mahasiswa mengapresiasi kebebasan mengeksplorasi minat mereka meski tidak selalu sesuai dengan program studi, mengingat relevansi antara studi dan pekerjaan sering tidak sepenuhnya sejalan. Menurut pandangan peserta, program ini menguntungkan kedua belah pihak yang mana perusahaan mendapatkan tenaga kerja gratis karena telah dibiayai melalui skema BBH yang dibiayai pemerintah, sementara mahasiswa mendapatkan kesempatan magang di perusahaan yang tergolong ternama melalui proses pendaftaran dan rekrutmen yang jelas dan terjamin oleh pemerintah, upah bulanan yang memadai melalui skema BBH, konversi SKS hingga 20 SKS yang menjadikan mereka tidak perlu berkuliah di dalam kampus, dan kurikulum magang yang terstruktur serta proses mentoring yang jelas (H.S.K., J.M., dan L.K., wawancara dengan penulis, Maret 2024).

Namun terdapat pengakuan dari salah satu peserta program, bahwa dengan adanya kesempatan untuk ikut program Magang Merdeka selama 2 (dua) semester atau berkesempatan memenuhi SKS hingga 40 SKS, hal ini yang kemudian menimbulkan potensi untuk mengabaikan beberapa mata kuliah yang sebenarnya penting untuk dipelajari di dalam program studi (L.K., wawancara dengan penulis, Maret, 2024). Hal ini yang kemudian menegaskan bahwa pada akhirnya perguruan tinggi seakan berperan hanya sebatas “mencetak” tenaga kerja untuk lebih fokus pada kegiatan di dunai kerja dan dunia industri, sehingga lebih memberikan akumulasi keuntungan kepada dunia industri dibandingkan perguruan tinggi. Tidak hanya itu, pengakuan peserta lainnya menjelaskan bahwa mereka cenderung mendaftar di perusahaan besar dan ternama dibandingkan perusahaan kecil atau perusahaan rintisan (*startup company*) karena berkaitan dengan *prestige* (G.A., wawancara dengan penulis, Maret, 2024). Pernyataan tersebut pada akhirnya membuktikan bahwa program MSIB cenderung menguntungkan perusahaan besar atau ternama dibandingkan perusahaan kecil – padahal program MSIB dirancang agar salah satunya dapat membantu perkembangan perusahaan kecil atau *startup*.

Keuntungan ini menunjukkan bahwa Magang Merdeka mengakomodasi kepentingan negara dalam mendorong kinerja ekonomi baik bagi mitra maupun peserta. Produktivitas perusahaan meningkat dengan tenaga kerja yang dibiayai pemerintah, dan mahasiswa memperoleh pelatihan kerja yang membekali mereka menjadi tenaga kerja berdaya saing global, sehingga diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun hal ini yang kemudian menjadi celah untuk dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan praktik yang merugikan bagi karyawan tetap yang dapat di-PHK kapan saja karena perusahaan merasa tercukupi oleh kehadiran peserta program Magang Merdeka yang dibiayai negara.

Tidak hanya itu, program ini juga terkesan lebih mengakomodasi perusahaan besar dibandingkan perusahaan yang tergolong kecil atau rintisan (*startup company*).

Sisi pasifikasi pada pelaksanaan program ini tidak tercermin dalam bentuk kekerasan fisik secara langsung oleh Kemdikbudristek, tetapi ada ruang potensi bagi perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerja "gratis" ini dengan leluasa dan mengarah pada potensi tindakan eksploitasi. Riandy dan Tapiheru (2022) menjelaskan bahwa program ini membuat mahasiswa menjadi sosok *powerless*, mencerminkan ketidaksetaraan dalam hubungan kerja dan kesenjangan perlindungan hak-hak mahasiswa magang. Program ini juga berpotensi menjadikan pendidikan berfungsi sebagai aparatus ideologis negara (*Ideological State Apparatus/ISA*) yang menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tidak hanya mentransfer keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memperkuat ketaatan pada aturan negara, sehingga lulusannya siap menjadi tenaga kerja yang mendukung kebutuhan pasar dan negara (Rachmat et al., 2022). Ketaatan ini kemudian mengatur kondisi yang seakan harus patuh kepada Kemdikbudristek sebagai pelaksana program ini – baik itu bagi perguruan tinggi, perusahaan mitra, maupun mahasiswa peserta. Hal ini terlihat dalam beberapa kesempatan yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim – salah satunya perihal ketaatan bagi perguruan tinggi melalui rektor hingga kepala program studi untuk memberikan konversi SKS yang sesuai dengan arahan Kemdikbudristek (Widiyana, 2021). Hal ini yang kemudian berimplikasi terhadap potensi pemaksaan bagi program studi untuk menyesuaikan perubahan kurikulum agar dapat memberikan konversi hingga sebesar 20 SKS yang telah disepakati sejak awal pelaksanaan program di setiap *batch*.

Saat ini juga, terdapat pemberlakuan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek kepada perguruan tinggi. IKU terbaru ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 yang menetapkan tiga indikator utama IKU, yang mana salah satunya adalah kualitas lulusan diukur dengan mendapat pekerjaan layak dan pengalaman di luar kampus. Indikator utama ini yang kemudian diturunkan pada IKU 1 yaitu Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak yang secara garis besar menjelaskan agar perguruan tinggi memenuhi kriteria-kriteria seperti gaji yang didapatkan lulusan 1,2 kali lipat dari upah minimum dan waktu masa tunggu mendapatkan kerja yang kurang dari 6 bulan pasca mendapatkan ijazah, serta IKU 2 yaitu Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus yang mana hal ini mencerminkan dari esensi pelaksanaan program MSIB itu sendiri yang memberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus hingga 2 semester. Penerapan IKU baru ini menciptakan "kompetisi" dan dorongan untuk mematuhi IKU karena adanya sistem penghitungan poin. Setiap pencapaian target standar emas, yaitu tolok ukur keunggulan bagi tiap IKU, memberikan tambahan 10 poin. Apabila perguruan tinggi dapat memenuhi poin IKU tersebut, maka akan berimplikasi pada Bantuan Operasional PTN (PTN) bagi PTN Selain Badan Hukum serta tambahan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH) (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2021).

Adanya sebuah arahan agar perguruan tinggi – dari rektorat hingga Tingkat program studi – untuk memberikan konversi 20 SKS dan adanya penerapan IKU

sebagai bentuk pemberian dana operasional bagi perguruan tinggi, dapat dilihat sebagai salah satu bentuk *underlay mechanism* untuk menjalankan potensi pasifikasi yang dijalankan oleh Kemdikbudristek kepada perguruan tinggi. Kembali pada konsep ISA, akhirnya menjadikan Kemdikbudristek menciptakan pendidikan sebagai alat untuk memperkuat ketaatan pada aturan negara dengan tujuan perguruan tinggi dapat “memproduksi” mahasiswa siap menjadi tenaga kerja yang mendukung kebutuhan industri dan negara (Rachmat et al., 2022). Langkah-langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menstandarisasi output pendidikan, mengurangi otonomi akademik, dan memaksa perguruan tinggi untuk mengikuti arahan pemerintah. Fokus pada pemenuhan IKU, pemberian konversi 20 SKS yang kemungkinan tidak sesuai dengan kurikulum program studi, dan terlalu fokus pada pengembangan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri berpotensi mengabaikan peran penting pendidikan tinggi dalam pengembangan pribadi, sosial, budaya, dan kemampuan kritis mahasiswa yang dibutuhkan dalam masyarakat yang kompleks dan dinamis.

Pandangan yang mengkritisi Magang Merdeka juga penulis dapatkan dari salah satu informan peserta program yang menyebutkan bahwa program ini berpotensi mengubah atau mengintervensi budaya mahasiswa, menjadikan mereka lebih menerima kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan mereka (H.S.K., wawancara, Maret 2024). Informan lebih lanjut menyebutkan implikasi program Magang Merdeka ini menjadikan mahasiswa hanya berfokus untuk mendapatkan BBH sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu juga, mahasiswa harus mematuhi peraturan-peraturan yang dijalankan oleh pemerintah dan juga perusahaan, seperti ketaatan untuk mengisi *logbook* sebagai bentuk monitoring kegiatan peserta dan ketaatan untuk memenuhi arahan perusahaan walaupun berpotensi berbeda dari *jobdesc* yang diberikan. Kritik ini menunjukkan bahwa program Magang Merdeka bisa menciptakan budaya kepatuhan yang kuat di kalangan mahasiswa. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan mempertanyakan kebijakan atau praktik yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai akademik dan etis, serta kemampuan berpikir kritis yang sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi mahasiswa di perguruan tinggi.

Selanjutnya dikaitkan dengan penjelasan premis fungsi legitimasi dari teori Hyman, program Magang Merdeka dapat dilihat sebagai bentuk upaya agar pemerintah mendapatkan dukungan publik melalui fasilitasi perusahaan mitra dan mahasiswa dengan mencerminkan komitmen Kemdikbudristek untuk menghubungkan angkatan kerja dengan dunia usaha dan industri global melalui program Magang Merdeka yang dipandang sebagai program *win win solution*. Tim MSIB secara aktif melakukan berbagai kegiatan pembentukan legitimasi publik seperti sosialisasi, webinar, campus fair, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan legitimasi berkelanjutan pada program ini hingga pemerintahan selanjutnya (Tim MSIB, wawancara dengan penulis, Mei 2024). Melalui narasi visi Indonesia Emas 2045, Kemdikbudristek berupaya untuk membentuk mahasiswa sebagai angkatan kerja yang mendukung kebijakan pemerintah, dengan menekankan pentingnya kesuksesan individu dalam nilai ekonomis sebagai karakter sukses yang juga memiliki nilai moral dalam masyarakat

(Evans, 2020). Upaya legitimasi yang dibangun Kemdikbudristek terukur pada animo 47 ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia terlibat menjadi peserta Angkatan/Batch 6 MSIB pada periode Februari hingga Juni 2024 (Kemdikbudristek, 2024). Tidak hanya itu, berdasarkan data *end-point survey* tim MSIB juga menyebutkan bahwa sekitar 70% dari total keseluruhan mitra dan 50% dari total keseluruhan mahasiswa peserta program menyatakan dukungan untuk program ini agar dilanjutkan (Tim MSIB, wawancara dengan penulis, Mei 2024)

Legitimasi pada negara juga datang dari perusahaan mitra program yang melihat program ini menguntungkan perusahaan dari segi dukungan operasional dan pengurangan beban biaya pekerja (PT JI dan PT ED, wawancara dengan penulis, Maret, 2024). Pemerintah mendapat citra positif dan dukungan politik dari kalangan pengusaha yang mendapatkan tenaga tambahan sehingga berpotensi memperkuat dukungan legitimasi kepada pemerintah (PT I, wawancara dengan penulis, Maret, 2024). Sedangkan dari perspektif mahasiswa peserta, program ini meningkatkan legitimasi pemerintah di mata mereka karena terpenuhinya pengalaman kerja dengan mendapatkan tambahan uang saku yang memenuhi kebutuhan hidup mahasiswa (K.K.; H.M.; dan B.A., wawancara dengan penulis, Maret, 2024). Mahasiswa menilai bahwa program Magang Merdeka cenderung lebih mempermudah untuk mendapatkan tempat magang dibandingkan harus mencari tempat magang secara mandiri, dan juga terkait kepastian pemberian uang saku melalui skema BBH menjadikan daya tawar program ini yang cenderung lebih menguntungkan bagi mahasiswa sebagai peserta. Dukungan-dukungan ini yang kemudian menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan dalam pembentukan program Magang Merdeka untuk mendapatkan legitimasi berupa dukungan populer dari kalangan swasta dan juga mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka buat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa program ini memerlukan legitimasi dari para stakeholder seperti peserta program, perusahaan mitra dunia industri, hingga lembaga pemerintahan. Program ini menjadi salah satu benchmark dari pelaksanaan kebijakan MBKM oleh Kemdikbudristek. Keberlanjutan program ini juga sangat bergantung bagaimana dinamika politik dan pemerintahan – utamanya saat pemerintahan selanjutnya (Tim MSIB, wawancara dengan penulis, Mei, 2024). Pergantian pemerintahan bisa membawa perubahan dalam prioritas dan kebijakan, terlebih lagi pada persoalan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan untuk mendanai program. Dukungan dari pemerintah, komitmen perusahaan mitra, kepuasan peserta, serta manajemen yang efektif dan berkelanjutan adalah elemen kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan program ini tetap relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengajukan pertanyaan “Bagaimana bentuk kepentingan negara dalam perannya melakukan intervensi terhadap hubungan industrial melalui program Magang Merdeka?” Berdasarkan analisis temuan studi empirik di tulisan ini ditemukan bahwa bentuk intervensi negara dalam hubungan industrial yang terjadi pada Magang Merdeka, adalah bentuk intervensi yang mengutamakan fungsi

akumulasi, pasifikasi, dan legitimasi. Program Magang Merdeka merupakan program yang dibentuk dengan tujuan mengoreksi program pemagangan sebelumnya yang dianggap oleh pemerintah kurang efektif dalam meningkatkan kompetensi *soft skills* dan *hard skills* mahasiswa karena berdurasi pendek, serta program ini dibuat sebagai sarana penyaluran dana Kemdikbudristek kepada mahasiswa dengan penugasan langsung di industri dan dunia kerja.

Fungsi akumulasi diwujudkan melalui program yang menguntungkan mitra dengan membantu efisiensi beban operasional perusahaan dalam merekrut tenaga kerja tambahan karena telah dibiayai oleh BBH, serta mendapatkan talenta magang yang dapat bekerja dalam konsep fleksibilitas kerja. Program ini juga menguntungkan mahasiswa peserta karena mendapatkan kesempatan magang di perusahaan ternama, upah bulanan memadai, konversi SKS, dan kurikulum magang terstruktur dengan mentoring jelas. Sisi pasifikasi, program ini membentuk kepatuhan birokratis perguruan tinggi untuk memenuhi konversi 20 SKS dan pelaksanaan IKU. Hal ini mengarah pada pasifikasi perguruan tinggi, mengurangi otonomi akademik, serta membentuk budaya kepatuhan mahasiswa dan institusi pendidikan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan industri dan pemerintah, mengabaikan pengembangan holistik dan kritis mahasiswa. Kemudian dari segi legitimasi, program Magang Merdeka berfungsi sebagai alat legitimasi pemerintah agar mahasiswa mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sementara secara administratif, program Magang Merdeka ini menguntungkan pemerintah karena menjadi sarana penyaluran anggaran belanja negara yang mensyaratkan alokasi total 20% pada sektor pendidikan. Artinya fungsi legitimasi politik dari kebijakan Magang Merdeka ini sangat lah kuat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran akademis terhadap studi mengenai praktik pemagangan di Indonesia. Namun tentunya penelitian ini memerlukan penelitian lanjutan yang diharapkan dapat mengisi *gap* penelitian untuk menganalisis lebih lanjut terkait bentuk-bentuk kepentingan negara yang lebih spesifik, seperti halnya mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah maupun perusahaan untuk mengukur dampak akumulasi keuntungan dari adanya program Magang Merdeka, upaya pasifikasi terhadap birokrasi pelaksanaan – yaitu melalui perguruan tinggi maupun pejabat kementerian, maupun bentuk atau upaya mobilisasi dukungan yang dilakukan kepada industri maupun mahasiswa dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan hubungan industrial. Selain itu juga karena keterbatasan pencarian informan penelitian, dapat dibahas pada penelitian lebih lanjut dengan mengambil latar informan dari jurusan rumpun kesehatan dan eksakta untuk melihat mekanisme pelaksanaan MBKM maupun MSIB di kedua rumpun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bryman, A. 2012. *Social Research Methods*, 4th Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI
- Hyman, R. 2008. "The State in Industrial Relations", dalam Blyton, et al (Eds.), *SAGE Handbook of Industrial Relations*. Los Angeles: SAGE.
- Tim Microdential. 2021. *Panduan Singkat Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Tummers, L. 2017. *Bureaucracy and Policy Alienation*. In: Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (3rd edition), edited by A. Farazmand (ed.). 1-8. New York: Springer Nature

### Artikel Jurnal

- Afriansyah, A., Voak, A., Fairman, B., Suryono, I. L., & Muslim, F. 2022. Implementing Kampus Merdeka: The Journey of a Thousand Miles Begins with One Tentative Step. *Journal of Resilient Economies*, 2(2): 49-54.
- Bawica, I. M. 2021. The Effects of Internship Program on the Employability Readiness. *International Journal of Academe and Industry Research*, 2(3): 86-101.
- Brewis, E. 2018. Fair access to higher education and discourses of development: a policy analysis from Indonesia. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 49(3): 1-18.
- Cannella, G. S., & Koro-Ljungberg, M. 2017. Neoliberalism in higher education: Can we understand? Can we resist and survive? Can we become without neoliberalism? *Cultural Studies Critical Methodologies*, 17(3): 155–162.
- European Centre for the Development of Vocational Training. 2022. Built to last: apprenticeship vision, purpose, and resilience in times of crisis: short papers from the Cedefop community of apprenticeship experts. *Cedefop working paper*, No 12.
- Evans, M. 2020. Navigating The Neoliberal University: Reflecting on Teaching Practice as A Teacher-Researcher-Trade Unionist. *British Journal of Sociology of Education*, 41(4): 574-590.
- Hadinata, F. 2021. Analisis Filosofis Implementasi Merdeka Belajar sebagai Instrumen Kesetaraan dan Pendidikan Demokratis. *MOZAIK HUMANIORA*, 21(2): 158–168.
- Hasan, A. & Hoesin, S. H. 2022. Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan "Kampus Merdeka" Oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(1): 667-678.
- Hutchinson, J. 2016. The State and Employment Relations in the Philippines. *Journal of Industrial Relations*, 58(2): 183-198.
- Kodrat, D. 2021. Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1): 9-14.
- Mala, G., Akash, G., & Jewel, S. 2020. A Study On Impact Of Internship On Regular Studies Of Undergraduate Students. *International Journal of Advance and Innovative Research*, 7(1): 92-99.

- Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. 2022. Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1): 675-685
- Rachmat, Hartono, & Muharrar, S. 2022. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Objektifikasi Kritis Pendidikan Seni. *BOTING LANGI: Jurnal Seni Pertunjukan*, 1(4): 215-225.
- Siminjutak, P., Voak, A., & Fairman, B. 2022. A Historical Account of VET Interventions in Indonesia: Which Way forward? *Asian Journal of University Education*, 18(2): 544-553.
- Sodik, J., Purwiyanta & Wijayanti, D. L. 2021. Research Synergy Foundation Village Economic Potential For The Implementation Of Learning Building Village / KKN Thematic MBKM Program Economic Study Program Development Department Of Economics, Faculty Of Economics And Business Of The UPN "Veteran" Yogyakarta. *RSF Conference Series: Business, Management And Social Sciences*, 1(3): 179-184.
- Syah, E. H. & Taun. 2023. Tinjauan Program Magang Kampus Merdeka dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(1): 31-44.

#### **Dokumen Lainnya**

- Gani, A. W., Malliongi, M. T., & Zainuddin, M. S. 2022. Neoliberalism and Higher Education in Indonesia (Re-scrutinizing the policy of the Independent Campus). *Seminar Nasional Hasil Penelitian 2022 "Membangun Negeri dengan Inovasi tiada Henti Melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat"*. LP2M-Universitas Negeri Makassar
- Muslim, A. Q., Muttaqin, A., Aziz, A. L., Putri, D. M. S., & Sabila, A. I. 2021. The Twists and Turns of State Universities with Legal Entity Status (PTN-BH) as a Form of Decentralization of Higher Education in Indonesia. *3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*. Atlantis Press.
- Riandy, D. & Tapiheru, J. E. S. 2022. Di Balik Magang: Normalisasi Prekarisasi Mahasiswa dalam Iklim Neoliberal (Studi Kasus Magang "Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.
- Susilo, J. 2021. Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi Restrukturalisasi Institusi Dan Perlawanan Gerakan Mahasiswa Kini (Studi Pasca PTN-BH UGM 2012-2020). *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.
- Toyibah, D. 2018. Neoliberalism and Inequality in Higher Education. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018)*: 1590-1597.
- Wirayudha, N. A. 2023. Eksploitasi Mahasiswa Pekerja Magang dalam Pemagangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai Bentuk Perbudakan Modern. *Skripsi*. Universitas Indonesia



### Artikel Online

- Adinda, P. 2022. Normalisasi Magang oleh Kampus Merdeka di Tengah Kosongnya Perlindungan Hukum. Diakses dari (<https://projectmultatuli.org/normalisasi-magang-oleh-kampus-merdeka-di-tengah-kosongnya-perlindungan-hukum/>), diakses 8 Februari 2024).
- Kemdikbudristek. 2024. Program MSIB Angkatan 6 Kemendikbudristek Siap Hasilkan 40.000 Lebih Talenta Muda Masa Depan, (Online), (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/02/program-msib-angkatan-6-kemendikbudristek-siap-hasilkan-40000-lebih-talenta-muda-masa-depan#:~:text=Pada%20tahun%20ini%2C%20telah%20terpilih,program%20MSIB%20diluncurkan%20pada%202021>), diakses 29 Maret 2024)
- Kemdikbudristek. 2023. Vokasifest x Kampus Merdeka Bahas Pentingnya Kampus Merdeka sebagai Wadah Pengembangan SDM Unggul, (Online), (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/12/vokasifest-x-kampus-merdeka-bahas-pentingnya-kampus-merdeka-sebagai-wadah-pengembangan-sdm-unggul>), diakses 29 Maret 2024)
- Rustandi, D. 2020. Merajut Ekosistem Pentahelix melalui Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, (Online), (<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/merajut-ekosistem-pentahelix-melalui-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>), diakses 11 Maret 2024).
- Widiyana, E. 2021. Nadiem Sebut Banyak Kepala Prodi Langgar Aturan soal MBKM, (Online), (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5777092/nadiem-sebut-banyak-kepala-prodi-langgar-aturan-soal-mbkm>), diakses 24 Juni 2024)

### Wawancara Informan

- A.F., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- B.A., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- G.A., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- H.E., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- H.M., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- H.S.K., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- J.M., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- K.K., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- L.K., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- Pekerja PT A, perusahaan media, wawancara dengan penulis, April 2024.
- Pekerja PT P., perusahaan asuransi, wawancara dengan penulis, April 2024
- Pekerja PT ED, perusahaan media, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- Pekerja PT I, perusahaan konsultan, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- Pekerja PT JI, perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- R.A., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
- Tim MSIB, institusi penyelenggara program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Mei 2024.